BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Upaya *Conservation International* (CI) dalam Melestarikan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP)

Upaya konservasi yang dilakukan *International Non Governmental Organization* (INGO) lingkungan hidup seperti CI tentunya dapat ditinjau dalam hubungan internasional. Organisasi internasional tentu saja melakukan kerjasama internasional, yang sebelumnya memiliki posisi sehingga dalam kerjasama internasional tersebut peran yang diharapkan darinya benar-benar membawa dampak positif bagi semua pihak. Upaya konservasi yang sudah tidak dilakukan di negara asal biasanya memiliki resiko lebih berat dibandingkan organiasasi yang hanya melakukan upayanya di tingkat lokal.

Upaya konservasi itu sendiri sudah menjadi masalah sensitif sehingga banyak konferensi yang membahas pelestarian berbagai ekosistem termasuk hutan di tingkat internasional, dan tentu saja CI adalah salah satu INGO yang mengemban amanah tersebut. Upaya konservasi juga membutuhkan reputasi baik dan benar dari masing-masing pihak yang akan melibatkan diri sehingga *Memorandum of Understanding* (MoU) dibuat oleh masing-masing negara yang menjadi target kerjasama setiap INGO lingkungan hidup. Dalam MoU itu sendiri sudah temuat banyak kriteria agar semua pihak mendapatkan dampak positif.

Kriteria bagi INGO adalah mendukung pemerintah setempat dalam melakukan upaya konservasi. CI sebagai INGO memiliki peran secara independen dan berfungsi

sebagai suplemen pemerintah dalam upaya konservasi hutan. Pemerintah Indonesia sendiri pun memiliki keterbatasan karena Indonesia memiliki masalah krusial lain seperti korupsi, kemiskinan, penyalahgunaan obat terlarang dan berbagai kepentingan politik lainnya. Pemerintah tidak mungkin melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan sendiri, pemerintah Indonesia bukanlah satu-satunya aktor yang melakukan kegiatan konservasi hutan.

Oleh sebab itu kewajiban CI yang secara tersirat diberlakukan pemerintah adalah membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal untuk melakukan konservasi hutan TNGGP di Jawa Barat, walaupun sudah ada pihak Balai Besar TNGGP yang merupakan bagian pemerintah yang secara langsung bertugas melestarikan TNGGP. Keberadaan CI sendiri di Jawa Barat merupakan salah satu cabang dari CI Divisi Asia Pasifik, yang selanjutnya merupakan bagian dari pusatnya yang berada di Arlington, Amerika Serikat. Hal ini sesuai dengan esensi yang dikemukakan Heins dalam Bab II.

Sesuai dengan sejarah CI dalam Bab III, tentunya ia memilih TNGGP sebagai salah satu kewasan konservasinya atas dasar inisiatif. Fakta bahwa Jawa Barat memliki ketergantungan tinggi pada hutan TNGGP membuat kekuatan CI sebagai INGO lingkungan hidup memiliki posisi yang hampir tidak dapat digugat, karena persoalan lingkungan hidup itu sendiri memerlukan semua pihak tanpa pandang bulu untuk menanganinya. Keadaan ini membuat CI mampu melakukan *lobby* dengan mitra dari sektor negeri agar cara CI dalam melestarikan TNGGP mendapatkan tanggapan positif. Hal ini sesuai dengan esensi yang dikemukakan Hurell dan Kingsbury dalam Bab II.

Upaya konservasi TNGGP merupakan wujud dari kepedulian pemerintah pada kondisi lingkungan hidup Jawa Barat yang memiliki populasi terpadat di Indonesia. Iklim Jawa Barat yang semakin hari semakin panas merupakan konsekuensi dari berkurangnya jumlah pohon keseluruhan dalam provinsi tersebut, dan konservasi TNGGP merupakan pilihan yang tidak dapat dilewatkan. Selain masalah iklim terdapat masalah eksploitasi dan degradasi lingkungan yang dialami TNGGP, akan dijelaskan selanjutnya dalam hasil wawancara peneliti dengan informan pada bagian berikutnya. Dengan demikian upaya konservasi TNGGP tidak terlepas dari esensi kepedulian lingkungan hidup yang dikemukakan oleh Baylis dan Smith.

Dalam melakukan berbagai upaya konservasi hutan CI yang berada di Indonesia menjalin hubungan kerjasama dengan Kementrian Kehutanan (Kemenhut) RI. Anton Aryo (AA) sebagai Manajer Konservasi CI untuk Gunung Gede Pangrango dan Halimun Salak (Gedepahala) dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa terjalinnya kerjasama tersebut terjadi secara alamiah, pemerintah yang memiliki keterbatasan dalam melestarikan hutan bersikap cukup terbuka pada pihak mana pun yang memiliki niat baik dalam membantu melestarikan hutan di Indonesia, termasuk hutan Pangrango.

Dalam menjalin hubungan kerjasama tersebut sudah tentu memerlukan sikap saling terbuka agar dapat saling mempercayai yang tercermin dalam nota kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang terdapat pada lampiran skripsi ini. Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan laju kerusakan hutan tertinggi pada tahun 2005-2006 sebanyak 1,6 juta hektar sehingga

menempatkannya sebagai negara urutan ketiga setelah Brazil dan Zaire sebagai negara yang mengalami kerusakan hutan di dunia.

Upaya konservasi hutan tidak dapat dilandaskan atas aspek ekologis saja, tetapi juga berbagai aspek lain seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya yang menggambarkan secara garis besar bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan hutan ditentukan oleh kebijakan pemerintah atas berbagai aspek kehidupan kewarganegaraan, kebutuhan masyarakat yang meningkat seiring dengan meningkatnya populasi masyarakat dan faktor kebudayaan yang juga mempengaruhi aspek sosial kehidupan bermasyarakat Indonesia yang semuanya berujung pada mental, persepsi dan perlakuan masyarakat Indonesia terhadap hutan (wawancara dengan AA dilakukan pada Kamis, 29 November 2012, pukul 15.00 WIB).

Melihat *urgency* dari pengamatan ini maka pada *website* TNGGP dalam *"Tentang TNGGP",* pemerintah mendeklarasikan hutan Pangrango sebagai salah satu dari lima taman nasional pada tahun 1980, dan sampai tahun 2007 sudah 50 taman nasional dibentuk menjadi taman nasional di seluruh Indonesia, pengelolaan Kawasan TNGGP merupakan tanggungjawab dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam (PHKA) Kemenhut RI (www.gedepangrango.com, diakses pada Kamis, 6 Desember 2012, pukul 19.00 WIB). Pada kenyataannya PHKA Kemenhut RI merupakan salah satu divisi kementrian tersebut yang juga berinteraksi secara langsung dengan berbagai organisasi konservasi hutan lain, termasuk INGO seperti CI dalam melestarikan TNGGP.

Selanjutnya persoalan pelestarian hutan secara langsung berkaitan dengan persoalan ketersediaan air tawar di muka bumi seperti yang telah ditekankan pada Bab I

dan Bab II mengenai sumber air tawar yang dikemukakan oleh Barlow dan Clarke. Pada dasarnya semua hutan di dunia termasuk hutan TNGGP memiliki fungsi menyimpan air tawar dari hujan dalam jumlah besar bagi konsumsi manusia. Salah satu kriteria yang memenuhi fungsi ini adalah banyak pohon berkanopi yang terdapat dalam TNGGP dan pepohonan demikian memiliki akar yang kuat untuk menahan air.

Dapat dikatakan bahwa Indonesia memiliki persoalan serius tentang penggunaan air tawar seiring dengan sikap masyarakatnya terhadap hutan. Peningkatan populasi manusia belum tentu dibarengi dengan peningkatan kesadaran mereka akan keberadaan hutan dalam berbagai aspek. Pada dasarnya ekosistem darat secara mutlak bergantung pada keberadaan sumber air tawar. Khusus di Jawa Barat, kehidupan sehari-hari warga pusat kota maupun pinggiran dan kehidupan di alam liar pun akan terus berjalan lancar jika sumber air tawar yang layak minum masih ada.

Anton Aryo (AA) sebagai Manajer Konservasi CI untuk Gunung Gede Pangrango dan Halimun Salak (Gedepahala) dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa ketertarikan CI untuk ikut serta dalam melestarikan hutan Pangrango disebabkan karena fakta bahwa hutan Pangrango memiliki kapasitas penyimpanan air yang lebih besar dibandingkan dengan hutan-hutan di provinsi lain dan lokasi hutan ini cukup dekat dengan kota Bandung dan Jakarta. Jaringan penyimpanan air di hutan Pangrango berkaitan dengan jaringan penyimpanan air hutan konservasi lain yang dekat dengannya, yakni hutan Halimun Salak.

Selanjutnya di wilayah sekitar hutan Halimun Salak terdapat beberapa waduk yang digunakan oleh berbagai perusahaan air minum seperti Aqua untuk memanfaatkan

air tersebut untuk dijual bagi konsumsi air minum masyarakat Indonesia secara umum. Secara khusus air tersebut juga selalu digunakan untuk keperluan irigasi masyarakat Jawa Barat. Ibukota Jakarta juga tidak dapat dipungkiri merasakan manfaat keberadaan hutan Pangrango dan Halimun Salak. Jakarta juga menggunakan air yang mengalir dari hutan Pangrango dan Halimun Salak untuk keperluan sehari dan keberadaan dua hutan konservasi tersebut juga secara teknis memberikan perlindungan bagi Jakarta agar tidak mengalami kebanjiran berlebih.

Kita dapat membayangkan bahwa dengan posisi Jakarta yang berada di dataran rendah dan dekat dengan laut akan suatu saat akan mengalami kehausan luar biasa di musim kemarau dan ancaman tenggelam di musim hujan jika hutan Pangrango dan Halimun Salak mengalami kegundulan total sebagai akibat dari tidak mendapatkan penanganan konservasi yang serius dari berbagai pihak. Dengan demikian rembesan air hujan dari arah Bogor dapat dibendung dengan terus meningkatkan kualitas fungsi hutan-hutan tersebut (wawancara dengan AA dilakukan pada Kamis, 29 November 2012, pukul 15.00 WIB).

Persoalan air tentu saja tidak terlepas dari penerapan konsep lingkungan hidup secara menyeluruh. Sesuai dengan esensi yang dikemukakan oleh Soewartomo dan Indriyanto pada Bab II, keberadaan manusia, hewan, tumbuhan, tanah, air, dan hutan TNGGP sendiri di Jawa Barat sebaiknya diperhatikan keseimbangan eksistensi satu sama lain agar mampu menciptakan interaksi harmonis antar unsur lingkungan tersebut. Jika tidak, maka kesejahteraan manusia itu sendiri yang menjadi taruhannya.

Persoalan air juga tidak terlepas dari pengelolaan hutan TNGGP maupun pemanfaatan air bersih secara langsung. Selama ini konservasi TNGGP menggunakan teknologi sesuai kebutuhan yakni pengumpulan data dan pemanfaatan air itu sendiri dilakukan dengan menggunakan teknologi sederhana oleh masyarakat sekitar. Jika kita menggunakan esensi yang dikemukakan Jackson dan Sorensen mengenai perselisihan paham ekoradikal dan modernis, peneliti melihat bahwa penggunaan teknologi yang langsung berpengaruh pada pelestarian TNGGP masih dalam batas normal karena kegiatan konservasi TNGGP masih diimbangi dengan keterampilan pegawai Balai Besar maupun CI.

Pengembangan kapasitas dalam melakukan konservasi TNGGP merupakan bagian vital dalam kerjasama internasional. Dengan menggunakan esensi yang dikemukakan oleh Archer kita dapat melihat bahwa sebenarnya tidak ada pihak yang seutuhnya kuat hingga mampu memenuhi kebutuhan atau kepentingan pribadi dengan minimnya atau tanpa bantuan aktor lain sama sekali, semuanya saling tergantung sehingga beberapa kebutuhan masing-masing menjadi tujuan bersama.

Dengan esensi lain yang dikemukakan oleh Chandler, kita dapat melihat bahwa khusus pelestarian TNGGP pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki kekuatan penuh, namun pada kenyataannya persoalan pelestarian TNGGP masih mendapatkan bantuan penanganan dari CI, dengan kata lain kekuatan pemerintah Indonesia tidak dapat mengalir lancar setiap saat sesuai yang diharapkan. CI memiliki agenda tersendiri yakni menjadi salah satu INGO lingkungan hidup yang memiliki reputasi terbaik dengan terus melakukan penelitian dan kemitraan yang fleksibel. CI sendiri bertumbuh di Amerika

Serikat sehingga sebagai salah satu entitas yang berasal dari negara maju, walaupun tidak bergantung pada pemerintahan negara asal, tetap merasakan *urgency* yang begitu kuat untuk menjadi penolong yang bertanggungjawab bagi pelestarian lingkungan hidup secara global.

Dalam kerjasama internasional yang dilakukan CI tentunya terdapat perbedaan persepsi akan kinerja masing-masing aktor yang terikat dalam MoU. Peneliti melihat tindakan CI dalam memberikan ekspektasi terhadap pemerintah merupakan sesuatu yang normal, demikian juga sebaliknya dengan perspektif Kemenhut RI terhadap CI selama ini. Berikut ini adalah esensi yang berasal dari perspektif pemerintah terhadap kinerja CI selama ini.

Nining Ngudi Purnamaningtyas (NP) sebagai Kepala Sub Bagian Kerjasama Sekretaris Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Sekdirjen PHKA) Kementrian Kehutanan (Kemenhut) RI dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa hutan Pangrango dijadikan sebagai kawasan konservasi karena mampu menampung air dalam jumlah besar dan dekat dengan pusat kegiatan penduduk. Di dalam hutan tersebut terdapat mata air yang mengisi sungai Citarum, Cisadane, dan Ciliwung.

Fenomena kemunculan berbagai INGO termasuk yang bergerak di bidang lingkungan hidup terjadi sejak awal tahun 80an, kemudian mulai bekerjasama dengan berbagai negara di awal tahun 90an. Upaya konservasi hutan itu sendiri dipelopori oleh *concern* berbagai ahli lingkungan Amerika dan Indonesia lebih banyak melakukan kerjasama dalam bidang konservasi lingkungan, khususnya hutan ke negara tersebut

sebagai dampak positif kebijakan penghapusan hutang, kemudian dengan berbagai negara Eropa.

Upaya konservasi hutan di Indonesia sendiri sudah dilakukan pemerintah sejak awal dekade 90an, namun anggaran pemerintah saat itu lebih banyak dialokasikan ke berbagai bidang lain yang dianggap lebih penting pada saat itu seperti ekonomi dan pendidikan. PHKA sendiri sebelumnya disebut Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPKA) yang pada tahun 80an masih memiliki anggota yang sedikit. Pemerintah Indonesia yang tentunya berganti dari waktu ke waktu tetap memperhatikan masalah hutan negara sehingga bersikap terbuka bagi INGO yang siap membantu pemerintah dalam hal ini. Persamaan visi dan misi setiap INGO lingkungan hidup yang ingin melakukan kegiatan konservasi merupakan hal vital bagi pemerintah. PHKA Kemenhut RI memastikan bahwa INGO yang masuk ke Indonesia memiliki reputas baik dan tidak berniat melakukan kegiatan yang penuh resiko di wilayah RI.

Walaupun demikian, dalam menjalankan upaya konservasi hutan masing-masing INGO yang masuk ke Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Beliau mengatakan bahwa *Greenpeace* lebih banyak menekankan aspek kampanye yang secara tegas bertujuan mengubah kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya Kalimantan dan Riau agar lebih menghargai hutan serta bersikap *independent* dalam berdiplomasi dengan pemerintah dan mengambil keputusan. Sebagai contoh permasalahan hutan di Riau, pemerintah memiliki sedikit campur tangan dan membiarkan *Greenpeace* melakukan sebagian besar tindakan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

World Wildlife Fund (WWF) dan *Conservation International* (CI) cenderung berfokus pada penemuan berbagai spesies hewan dan tumbuhan baru dan membangun banyak koneksi dengan berbagai mitra agar mampu melancarkan upaya konservasi yang mereka lakukan. Hasil penemuan yang mereka dapatkan kemudian akan dijadikan sebagai landasan untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan vitalnya hutan sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara lebih bijak.

The Nature Consevancy (TNC) tidak melakukan banyak kampanye maupun penemuan di lapangan, tetapi berperan sebagai pihak yang mengumpulkan, mengolah, menukar, dan menyebarkan data perkembangan ekosistem hutan dari berbagai INGO lingkungan hidup lainnya dengan berbagai instansi yang membutuhkan data.

Flora and Fauna International (FFI) lebih berfokus pada konservasi jenis hewan dan tumbuhan yang dianggap hampir punah. Contohnya di hutan Riau yang terdapat harimau. Di sana, FFI memiliki banyak tenaga kerja yang khusus memelihara harimau agar dapat berkembang biak dengan lebih mudah dan mereka mampu membedakan identitas harimau yang ada secara individu.

Dengan demikian, pemerintah Indonesia melalui PHKA Kemenhut RI memberlakukan peraturan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing INGO tersebut melalui berbagai nota kesepakatan dan melakukan berbagai pertemuan khusus untuk mengevaluasi masing-masing kinerja INGO yang ada sehingga titik temu antara kepentingan berbagai pihak yakni konservasi hutan tetap terjaga (wawancara dengan NP dilakukan pada Jumat, 11 Januari 2013, pukul 14.00 WIB).

Berkaitan dengan esensi yang dikemukakan oleh Jackson dan Sorensen mengenai hubungan internasional, informan ini menyatakan bahwa hubungan internasional Indonesia dan Amerika menimbulkan kerjasama internasional yang terpusat pada negara kuat seperti Amerika. Peneliti memandang bahwa kerjasama internasional ini dapat dilakukan dengan entitas yang tidak selalu berupa pemerintah negara yang bersangkutan, tetapi juga dengan entitas lain yang punya kekuatan vital. Peneliti pun melihat bahwa Amerika secara keseluruhan merupakan negara dengan kekuatan besar dalam berbagai bidang termasuk lingkungan hidup sehingga Indonesia menjadikannya sebagai mitra utama dalam kerjasama internasional. Dengan demikian hal ini tercermin dalam esensi Sugiono melalui Hadiwinata mengenai kerjasama internasional.

Jika kita menggunakan esensi yang dikemukakan Mas'oed dan Arfani mengenai kedudukan dan peran, kedua hal tersebut ditentukan oleh jati diri masing-masing aktor yang tampak dalam interaksi dan kerjasama satu sama lain. Peneliti melihat bahwa pemerintah Indonesia menghargai reputasi setiap INGO yang melakukan upaya konservasi di Indonesia. Pemerintah tidak perlu membeda-bedakan atau bahkan mengistimewakan setiap INGO karena mereka sudah memiliki identitas masing-masing yang kemudian menjadi landasan kedudukan dan peran mereka. Itulah sebabnya MoU setiap INGO dengan Kemenhut RI berbeda satu sama lain. Hal yang diperhatikan pemerintah Indonesia selanjutnya adalah kekonsistenan masing-masing pihak yang mampu berkontribusi secara sehat. Dengan demikian secara tidak langsung INGO seperti CI pun sebenarnya masih berada di bawah pengawasan pemerintah.

Dalam konteks lingkungan hidup, walaupun Balai Besar adalah anak buah pemerintah untuk melestarikan TNGGP dan CI memiliki reputasi baik, sebenarnya upaya konservasi tidak ada yang sempurna karena selama masyarakat masih bergantung pada alam maka upaya konservasi tidak hanya meliputi aspek ekologis saja, tetapi juga aspek sosio-ekonomi. Yang dapat mereka lakukan adalah mempertahankan upaya yang sudah mereka lakukan selama ini. Pada bagian selanjutnya peneliti memaparkan hasil wawancara dengan informan Balai Besar TNGGP mengenai upaya konservasi wilayah tersebut.

Hidaya Santosa (HS) sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) mengatakan bahwa upaya konservasi yang dilakukan Balai Besar selama ini mengalami tentunya tidak akan berhasil sampai sejauh ini tanpa kehadiran CI. Pengelolaan TNGGP sendiri berubah dari kawasan hutan lindung menjadi hutan konservasi. Hal ini disebabkan karena pemerintah menganggap hutan Pangrango lebih memenuhi kriteria hutan konservasi yang lebih fleksibel terhadap masyarakat luas dibandingkan dengan hutan lindung yang dianggap beliau lebih ketat dan kaku.

Beliau memandang bahwa motivasi CI melakukan kegiatan konservasinya adalah CI memandang TNGGP sebagai lokasi penelitian vital akan spesies hewan langka yang tidak dapat ditemukan di wilayah lain seperti owa Jawa. Owa Jawa adalah mamalia monogami dan satwa asli pulau Jawa. demikian pula dengan elang Jawa. Dengan demikian keberadaan owa Jawa sebaiknya dipelihara dengan lebih serius.

Selama ini upaya konservasi CI berada di Bodogol, lokasi ini dipandang sebagai lokasi menguntungkan bagi penelitian CI. Beliau memandang bahwa memang masing-masing yang ada sebaiknya saling melengkapi. Hal ini tampak bahwa dalam melakukan upaya konservasi bersama, pegawai Balai sering mendapatkan pelatihan dan berbagai tutotial lainnya dari pegawai CI yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih mumpuni.

Hal lain yang dilakukan CI selama ini adalah selalu melaporkan berbagai data mengenai keadaan pohon dan hewan TNGGP. Pihak Balai Besar sendiri berperan sebagai pengambil keputusan mengenai tindakan yang akan dilakukan jika terjadi kerusakan akibat penebangan, perburuan dan berbagai bentuk perusakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Selama melakukan upaya konservasi bersama, beliau menyatakan bahwa keamanan TNGGP meningkat 20% dan pemanfaatan kawasan tersebut sebagai aset ekowisata meningkat 45%, terutama di Bodogol. Peningkatan ekowisata itu sendiri disebabkan karena kemampuan CI dalam mempromosikan TNGGP sebagai kawasan konservasi dapat menarik masyarakat. Dengan demikian beliau bersyukur dan lega karena selama ini CI selalu ada untuk membantu (wawancara dengan HS dilakukan pada Kamis, 7 Februari 2013, pukul 10.00 WIB).

Di sini kita dapat melihat bahwa upaya konservasi TNGGP berkaitan erat dengan dua persoalan lain yakni spesies hewan dan tumbuhan dan pertahanan iklim. Informan yang bersangkutan mengedepankan vitalnya eksistensi elang, macan tutul dan owa Jawa bagi ekosistem TNGGP, dan bahkan Jawa Barat secara menyeluruh. Peneliti melihat bahwa *urgency* ini berkaitan dengan esensi yang dikemukakan Myers dan *World Bank*

melalui Ekins bahwa sebagian besar masyarakat masih kurang peduli dengan keberadaan hewan dan tumbuhan endemik tersebut.

Demikian juga dengan perubahan iklim. Peneliti melihat bahwa bertambahnya jumlah penduduk Jawa Barat menyebabkan hilangnya tempat bagi pertumbuhan pohon di dari wilayah perkotaan sampai pedesaan. Konservasi TNGGP menjadi hal mutlak bagi kestabilan iklim Jawa Barat, namun peneliti dan para informan di sini melihat bahwa keseimbangan ekosistem sebaiknya diupayakan secara menyeluruh pada suatu provinsi, tidak hanya terpaku pada wilayah konservasi saja. Jika hal ini terus berlanjut maka Jawa Barat akan menjadi salah satu pihak yang berkontribusi pada perusakan alam dunia, berlanjut pada konsekuensi yang dikemukakan oleh Broome dan Hongton.

Masyarakat masih kurang memperhatikan perubahan-perubahan ekosistem yang menuju pada ketidakseimbangan karena merasa masih ada kepentingan lain yang lebih mendesak. Hal ini menimbulkan kendala konservasi dan upaya menanggulangi kendala tersebt yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Dari sinilah kita melihat bahwa keberadaan setiap pihak berfungsi saling melengkapi karena konservasi hutan merupakan kewajiban moral bersama. Seperti yang dikemukakan Heins, peneliti melihat bahwa peran CI lebih menitikberatkan pada moral dibandingkan dengan *profit* yang didapatkannya. Ia akan merasa lebih berarti jika terus memiliki kesempatan untuk berkontribusi kepada Balai Besar TNGGP demi kebaikan bersama.

4.2. Penerapan Berbagai Program *Conservation International* (CI) untuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP)

Berkaitan dengan esensi yang dikemukakan Levinson melalui Mas'oed, upaya konservasi hutan yang dilakukan CI tentunya disesuaikan dengan keadaan setiap tempat di mana ia beroperasi. Maka dari itu peneliti melihat bahwa konsep peran di sini sebenarnya berkaitan secara implisit dengan konsep interaksi lingkungan hidup yang dikemukakan oleh Soewartomo dan UU RI No. 4 Tahun 1982 melalui Indriyanto. Peneliti melihat bahwa untuk menghasilkan peran yang dapat diterima oleh masyarakat setempat, maka CI melakukan interaksi dengan organisasi lain dan masyarakat Jawa Barat. Dengan demikian CI memahami perbedaan *urgency* konservasi hutan di setiap provinsi, tercermin dalam pembedaan program konservasi hutan setiap wilayah sebagai wujud nyata pemenuhan peran CI sesuai dengan tuntutan pemerintah Indonesia.

MoU yang berlaku sampai sekarang merupakan pedoman standar upaya konservasi hutan tingkat nasional. Di sisi lain, CI memiliki ruang gerak yang cukup untuk mencapai agendanya karena MoU yang ada tidak mengatur atau memberikan instruksi secara spesifik berbagai hal yang akan dilakukan CI di berbagai daerah. MoU ini berfungsi sebagai penyeimbang peran yang dilakukan Kemenhut RI dan CI agar tidak ada pihak yang mengalami beban berlebih dalam melakukan tanggungjawab di TNGGP. CI menyatakan bahwa dirinya selalu siap untuk mengikuti aturan main yang dibuat pemerintah. CI sudah memiliki peralatan dan fasilitas memadai dan hanya perlu meminta izin pada pemerintah untuk memasang sarana atau fasilitas yang berguna bagi

masyarakat. Dengan demikian CI memenuhi esensi yang dikemukakan Hurell dan Kingsbury mengenai karakteristik INGO.

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan enam program CI untuk hutan Pangrango dan dalam Bab I telah digarisbawahi bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan program reforestasi sebagai salah satu dari enam program tersebut sekaligus sebagai payung dan tujuan akhir dari program yang ada dalam kurun waktu 2010-2012 ini. Program reforestasi CI tentunya didukung oleh dua program lainnya seperti edukasi dan *awareness*. Menjalankan program reforestasi TNGGP perlu melibatkan masyarakat petani yang mayoritas tinggal di sekitar TNGGP dan CI mengambil bagian untuk terus mendidik masyarakat dalam memanfaatkan hasil alam dengan bijak dan bertanggungjawab melalui berbagai programnya. Dengan demikian CI memenuhi esensi yang dikemukakan Coser dan Rosenberg mengenai konsep peran.

Anton Aryo (AA) sebagai Manajer Konservasi CI untuk Gunung Gede Pangrango dan Halimun Salak (Gedepahala) dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa dalam kurun waktu 2010-2012 program reforestasi CI mengalami kemajuan dari waktu ke waktu, ditandai dengan penambahan program, kebutuhan Kemenhut RI akan pengetahuan mendalam tentang konservasi hutan berkelanjutan serta penambahan luas hutan yang sedikit demi sedikit tampak signifikan. Beliau beserta stafnya terus mengupayakan agar kesadaran masyarkat Jawa Barat termasuk Jakarta tidak pudar dengan penuh kesabaran dan kerjasama multipihak yang ada dalam bab sebelumnya.

Cara yang digunakan adalah mengajarkan penduduk yang berada di usia sekolah hingga usia kerja berbagai cara dalam memelihara hutan dimulai dari tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya hingga melibatkan mereka dalam salah satu program yakni adopsi pohon. Dalam program adopsi pohon masyarakat hilir yakni mereka yang tinggal di pusat kota dan masyarakat hulu yakni mereka yang tinggal di 66 desa yang terletak dekat hutan Pangrango bersama-sama menanam pohon di lahan hutan yang masih terbuka. Sampai saat ini program adopsi pohon di Bodogol mengalami perkembangan dengan tertanamnya 100.000 pohon jenis alami TNGGP yang membuat kawasan yang ada mengalami perluasan sebesar 250 hektar.

Program ini dipadukan dengan pemberdayaan masyarakat berupa peternakan kambing dan kelinci, perikanan dan pertanian. Adopsi pohon juga mempererat hubungan antara masyarakat kota dan desa dalam suatu hubungan sosial yang bernaung di bawah kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan akan hutan yang secara khusus sebagai sumber air tawar yang layak dikonsumsi oleh kita semua. Program reforestasi itu sendiri dilakukan dengan kegiatan pembangunan *Green Wall* di Ngarak dengan memadukan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti penyediaan air bersih, energi listrik tenaga air, peternakan kambing, perikanan dan pertanian.

Untuk kalangan masyarakat yang bekerja di perusahaan maka CI turut membantu perusahaan mereka dalam melakukan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di mana mereka boleh saja menyumbangkan dana, namun sebaiknya mereka juga turut serta dalam program adopsi pohon di mana mereka seolah-olah memelihara pohon yang mereka tanam sebagai rasa cinta mereka terhadap hutan. Penerapan program ini tentu saja

mampu memenuhi kebutuhan berbagai pihak seperti yang dilandaskan pada MoU antara CI dan Kemenhut RI, khususnya berujung pada reforestasi yang secara harafiah mempertahankan jumlah pohon yang memadai dalam hutan Pangrango

Dalam program edukasi CI menanamkan kesadaran akan hutan dalam diri masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah pendidikan, penelitian dan ekowisata di Bodogol. Selain itu CI juga menyelenggarakan kegiatan peningkatan kemampuan pegawai Balai Besar TNGGP melalui berbagai pelatihan pengawasan keanekaragaman hayati di sana.

Dalam program *awareness* CI dan TNGGP terus meng*update* statistik luas hutan, jumlah hewan khas hutan tersebut yang secara khusus didukung oleh program konservasi spesies, populasi penduduk dan jumlah air yang tersimpan di Pangarango kepada Kemenhut, kalangan akademis seperti mahasiswa dan dosen yang secara khusus bergerak di bidang lingkungan dan kehutanan, dan masyarakat luas dari berbagai kalangan lainnya.

Dalam pengembangan program rehabilitas owa Jawa di Bodogol, CI juga bekerjasama dengan Yayasan Owa Jawa yang merupakan organisasi lokal. Hingga saat ini terdapat enam pasang owa Jawa yang akan dilepasliarkan pada tahun 2013 dan 2014 di kawasan Gunung Puntang, Bandung Selatan. Konservasi spesies juga dilakukan dalam program pengawasan spesies terhadap macan tutul Jawa dengan memasang kamera tersembunyi di bagian-bagian yang sering dilintasi macan tutul dalam TNGGP (wawancara dengan AA dilakukan pada Kamis, 29 November 2012, pukul 15.00 WIB).

Berbagai program CI untuk TNGGP merupakan pemenuhan tuntutan masyarakat yang tidak bisa lepas dari pemanfaatan hasil alam TNGGP. Seperti esensi yang

dikemukakan oleh Levinson melalui Mas'oed, CI di Jawa Barat sudah menjadi bagian dari struktur masyarakat karena selama ini ia konsisten dengan MoU dan kebijakannya sendiri. Peneliti melihat bahwa khusus untuk masyarakat Sunda CI mengurangi cara-cara yang dianggap kurang efektif seperti penyuluhan dan kampanye yang hanya akan membuang-buang waktu, tenaga dan biaya, namun CI melakukan musyawarah atas dasar kekeluargaan dan secara khusus bekerjasama dengan para petani dalam konservasi hutan. Dengan kata lain diperlukan cara halus dan efektif untuk menjaga komitmen masyarakat Jawa Barat terhadap pelestarian TNGGP.

Peneliti melihat bahwa program-program CI diprioritaskan untuk memenuhi tuntutan ekonomi masyarakat di sekitar TNGGP yang berprofesi sebagai petani. Biasanya kehidupan petani tidak serumit kehidupan masyarakat perkotaan, namun aspek ekonomi mereka tidak bisa dianggap remeh. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat pendidikan yang diterima oleh para petani ini. Mereka terus mendapatkan bimbingan langsung dari CI dan Balai Besar mengenai pemanfaatan alam yang benar. Penerapan berbagai program ini mencerminkan esensi yang dikemukakan oleh UU RI No 4 Tahun 1992 melalui Salim mengenai definisi dan tujuan dasar konservasi.

Salah satu contoh yang tampak adalah pemberdayaan petani yang hidup di pinggir hutan TNGGP. Selama ini petani telah berjasa untuk memenuhi kebutuhan beras yang sudah menjadi hajat hidup masyarakat Jawa Barat bahkan seluruh Indonesia. Keadaan ekonomi negara tidak selalu stabil dan saat ini kita lebih banyak mengimpor beras sehingga menimbulkan kendala bagi produktivitas para petani yang hidup di sekitar

TNGGP. Dengan demikian keadaan ini merupakan cerminan yang terdapat dalam esensi yang dikemukakan oleh Ekins.

Dari perspektif pemerintah hutan Pangrango lebih cocok untuk dijadikan hutan konservasi karena ia memenuhi kriteria yang dikemukakan UU RI Pasal 6-7 No. 41 Tahun 1999 melalui Salim. Hal lain yang membuatnya cocok dijadikan kawasan konservasi dibandingkan kawasan lindung adalah karena TNGGP merupakan lokasi keanekaragaman hayati terdekat dengan Bandung dan Jakarta sebagai pusat populasi penduduk dan kekuatan politik Indonesia. Dengan demikian pemerintah melalui Kemenhut RI menyadari bahwa TNGGP merupakan salah satu kesempatan konservasi terbaik di mana masyarakat Jawa Barat sebaiknya diperkenalkan dengan kawasan konservasi yang selama ini menjadi penyangga kehidupan mereka melalui program pendakian bagi pecinta alam.

Nining Ngudi Purnamaningtyas (NP) sebagai Kepala Sub Bagian Kerjasama Sekretaris Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Sekdirjen PHKA) Kementrian Kehutanan (Kemenhut) RI dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa program edukasi dan *awareness* yang dilakukan CI memang memiliki kaitan erat dan vital bagi program reforestasi. Beliau mengatakan bahwa ekspektasi pemerintah sampai saat ini masih cukup besar bagi CI dalam menjalankan program-program ini untuk terus berlanjut tanpa mengalami kemacetan yang serius.

Beliau memandang bahwa TNGGP berpotensi sebagai lokasi ekowisata yang ideal karena dekat dengan Bandung dan Jakarta. Hal ini pula yang dianggap sebagai ketertarikan CI memilih TNGGP sebagai salah satu lokasi konservasinya, di mana

mencerminkan jati diri CI sebagai INGO lingkungan hidup yang lebih banyak berfokus pada penelitan lapangan, pembangunan kemitraan, dan implementasi *Science & Knowledge* (S&K) bagi masyarakat. PHKA Kemenhut RI sendiri berperan sebagai wakil pemerintah dalam menerapkan konsolidasi sebagai media penerapan berbagai program CI (wawancara dengan NP dilakukan pada Jumat, 11 Januari 2013, pukul 14.00 WIB).

Di sini kita dapat melihat bahwa kekuatan CI di Jawa Barat tidak mengalami gangguan dari luar, bahkan dapat dikatakan bahwa CI memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah. Selama melakukan programnya CI tidak terlalu masuk dalam kepentingan politik negara secara keseluruhan, hanya sebatas pemerintahan daerah karena pemerintah ini secara langsung yang menentukan kebijakan pengelolaan TNGGP. CI tidak memerlukan hak istimewa dari pemerintah dalam melakukan berbagai programnya. Yang diperlukan hanyalah persetujuan pemerintah untuk terus ada di TNGGP. Dengan demikian hal ini tercermin dalam esensi yang dikemukakan oleh Heins.

Peran yang dilakukan CI sampai saat ini tidak luput dari kekurangan. Hal ini dapat dimaklumi karena sesuai dengan esensi yang dikemukakan Merle, CI sebaiknya mampu memelihara kualitas kinerjanya di TNGGP terhadap dunia luar, khususnya dalam wilayah Asia Pasifik. Kekurangan dalam kinerja sebuah INGO berkaitan dengan cara INGO tersebut untuk mempertahankan eksistensinya yang tidak terlepas dari pendanaan, seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Oleh sebab itu CI lebih memilih untuk melakukan berbagai programnya sesuai dengan keadaan diri yang mendesak. Berikut ini terdapat perspektif yang disampaikan oleh pihak Balai Besar TNGGP, yang selama ini menjadi mitra utama CI di Jawa Barat.

Hidaya Santosa (HS) sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) mengatakan bahwa selama ini penerapan program CI sudah menbawa perubahan berarti namun beliau memandang bahwa kemajuan yang dialami pun sebenarnya belum merata. Selain itu dalam melakukan berbagai programnya CI cenderung lebih menekankan aspek penelitian dan melakukan interaksi sebatas kepada Kemenhut RI, Balai Besar dan berbagai mitra lainnya daripada dengan masyarakat secara langsung. Beliau sendiri selalu mengingatkan Anton Aryo sebagai manajer konservasi CI di TNGGP agar lebih membagi fokusnya yang selama ini lebih banyak berpusat di Bodogol (wawancara dengan HS dilakukan pada Kamis, 7 Februari 2013, pukul 10.00 WIB).

Jika kita kembali lagi pada esensi yang dikemukakan oleh Mc. Celland dan Chandler, CI dapat dikatakan lebih berfokus pada pemenuhan kepentingan organisasionalnya kemudian berfokus pada hal lain. Peneliti melihat bahwa hal ini terjadi bukan karena ego CI maupun pihak manapun, namun CI sendiri masih berjuang mempertahankan keberadaannya di Jawa Barat secara efektif. Dengan demikian peneliti melihat bahwa dalam melakukan kerjasama dan menjalankan programnya, CI sebaiknya terus membaca situasi agar tidak terjerumus dalam persoalan yang lebih serius. Peneliti memandang bahwa kemajuan program CI untuk TNGGP selama ini baik dan benar, namun semua itu merupakan perjuangan dalam menghadapi berbagai kendala yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya.

4.3. Berbagai Persoalan yang Dihadapi *Conservation International* (CI) dalam Menjalankan Berbagai Programnya untuk Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP)

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa selama ini CI mengalami kendala dana dan teknis pada tingkat regional dan nasional. Peneliti melihat bahwa dua kendala yang terjadi pada tingkat regional dan nasional tersebut memberikan dampak negatif bagi kinerja CI di TNGGP. Namun peneliti juga melihat bahwa kendala bisa saja muncul dari pihak lain seperti perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari arti hutan konservasi TNGGP. Peneliti melihat bahwa kendala dana yang dialami CI merupakan konsekuensi MoU yang diberlakukan bagi CI, yakni ia tidak boleh menggalang dana di dalam negeri. Untuk mengetahui pendanaan CI secara lebih rinci dari laporan tersebut dapat dilihat pada lampiran skripsi ini.

Berkaitan dengan esensi yang dikemukakan *The Union of International Association* melalui Rudy dan informasi yang terdapat dalam bab sebelumnya, kita dapat melihat bahwa CI menggalang dana dari tiga negara yakni Amerika Serikat, China dan Singapura. Selain itu pemeliharaan sumber dana CI selalu berkaitan dengan pergantian kepengurusan CI, termasuk program TNGGP. Peneliti melihat bahwa persoalan inilah yang menjadi ujian bagi kesukarelaan CI dalam melakukan program-programnya di TNGGP dan komitmen bagi setiap staf CI. Dengan demikian selama ini CI berjuang bagi seutuhnya bagi nilai moral dan bukan bagian dari politik sebuah negara. Hal ini sesuai dengan esensi yang dikemukakan oleh Heins dan Henderson.

Anton Aryo (AA) sebagai Manajer Konservasi CI untuk Gunung Gede Pangrango dan Halimun Salak (Gedepahala) dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa dalam kurun waktu 2010-2012 ini dua kendala di atas yakni pendanaan dan teknis memang secara umum dialami oleh cabang CI terutama yang berada di wilayah Papua. Untuk program Gedepahala sendiri beliau mengatakan bahwa sampai saat ini CI terkadang berjuang dalam memelihara berbagai sumber dana karena keberadaannya di Jawa Barat masih INGO saja.

Agar dapat menggalang dana secara lokal maka CI harus mengubah bentuknya menjadi yayasan, namun beliau berpendapat bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang *urgent* bagi CI program Gedepahala karena sampai saat ini persoalan pendanaan masih dapat dikelola dengan baik dan alangkah baiknya bagi pihak CI sendiri untuk bertindak bijak dan adil dengan membiarkan berbagai organisasi lokal yang secara bersamaan bermitra dengan CI program ini untuk menggalang dana baik dari sumber lain maupun dari CI sendiri. Beliau juga mengatakan bahwa semua program CI didanai dari pusatnya yaitu di Arlington, Amerika Serikat.

Berkaitan pula dengan kendala teknis, beliau mengatakan berdasarkan MoU, di samping CI tidak boleh menggalang dana secara lokal, CI juga tidak boleh melakukan advokasi apabila terjadi perusakan hutan secara sengaja oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. CI hanya melaporkan yang terjadi di lapangan kepada Kemenhut RI dan tindakan jalur hukum merupakan pekerjaan pemerintah seutuhnya tanpa campur tangan pihak manapun. Kemenhut RI hanya membantu CI dari segi birokrasi yakni

memberi berbagai kemudahan bagi CI dalam memenuhi berbagai kebijakan pemerintah terhadapnya, bantuan teknis dan pendampingan yang dijelaskan dalam laporan tersebut.

Selain dari kendala-kendala tersebut hanya terdapat berbagai resiko kecil namun juga tetap disikapi secara serius oleh CI yakni keadaan alam itu sendiri yang sering terjadi longsor sehingga staf dan beliau sendiri sebaiknya bersikap hati-hati ketika bertugas, masing-masing mereka menjaga kesehatan pribadi karena terkadang suhu yang ada tidak bersahabat dan terus memastikan bahwa lokasi TNGGP bebas dari kerusakan seperti pembuangan sampah sembarangan dan lain sebagainya, walaupun tempat tinggal beliau dekat dengan kawasan konservasi.

Hal lain yang sering diperhatikan beliau adalah pergantian kepemimpinan Balai Besar TNGGP yang juga dapat menimbulkan kendala jika tidak disikapi dengan serius. Pergantian kepemimpinan sering menimbulkan pergantian program dan CI senantiasa menyesuaikan diri dengan visi, misi dan idiosinkretik masing-masing pemimpin Balai Besar TNGGP yang berbeda dari waktu. Contohnya CI membantu meningkatkan kelancaran program ekowisata dan patroli yang menjadi tolak ukur kepemimpinan Balai Besar TNGGP sebelumnya yakni bapak Agus Wahyudi dan sekarang diganti oleh bapak Herry yang menitikberatkan pada program pemberdayaan masyarakat yang sinergis dengan edukasi dan *awareness* demi kelancaran reforestasi TNGGP (wawancara dengan AA dilakukan pada Kamis, 29 November 2012, pukul 15.00 WIB).

Di sini kita melihat bahwa pola hubungan antara CI dan Balai Besar dipengaruhi oleh kekuatan pemerintah untuk mengambil keputusan pada pelestarian TNGGP. Kekuatan politik seperti ini menentukan etika CI dalam pola hubungannya dengan Balai

Besar dan Kemenhut RI. Walaupun CI memiliki penguasaan keterampilan yang lebih baik daripada pegawai pemerintah, ia tetap melakukan kegiatannya sesuai dengan batas-batas yang terdapat dalam MoU.

Peneliti melihat bahwa pemerintah masih menjadi aktor utama penentu kebijakan, namun jika dikaitkan dengan esensi yang dikemukakan Sugiono melalui Hadiwinata tidak selamanya negara sebagai aktor pembuat kebijakan juga berperan sebagai aktor yang memahami persoalan konservasi TNGGP secara mendalam. Selanjutnya kerjasama internasional ini tidak mengalami ketidakseimbangan beban, namun tentu saja pemerintah memiliki perspektif sendiri mengenai munculnya persoalan konservasi TNGGP.

Nining Ngudi Purnamaningtyas (NP) sebagai Kepala Sub Bagian Kerjasama Sekretaris Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Sekdirjen PHKA) Kementrian Kehutanan (Kemenhut) RI dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa kendala dana masih dapat ditangani oleh CI dengan baik, namun beliau memandang bahwa sampai sejauh ini dana keseluruhan CI lebih banyak dialokasikan untuk upaya konservasi laut.

PHKA Kemenhut RI terus menghimbau berbagai INGO yang ada termasuk CI agar lebih hati-hati dalam mengalokasikan dana. Upaya konservasi laut biasanya lebih banyak memiliki resiko dibandingkan dengan upaya konservasi darat karena wilayah laut Indonesia sampai saat ini masih rawan akan perselisihan politik dengan berbagai negara tetangga, luasnya wilayah perairan yang ada, berkurangnya jumlah terumbu karang dan

ikan serta faktor keselamatan tim penyelam sehingga pemerintah membutuhkan orang-orang yang kompeten dalam melakukan penyelaman.

Beliau memandang bahwa akibat kekurangseimbangan pengalokasian dana ini menyebabkan kurang lancarnya program edukasi dan *awareness* yang dilakukan CI untuk mendukung program reforestasi TNGGP. Program reforestasi itu sendiri sebenarnya sudah mengalami kemajuan namun kendala yang dialami program edukasi dan *awareness* pun masih ada. Hal ini tampak dari perilaku masyarakat yang kurang bertanggungjawab.

Masyarakat sekitar TNGGP masih banyak membuang sampah sembarangan sehingga sampah yang diangkut ke Jakarta selama dua kali dalam setahun bertambah jumlahnya. Hal lain yang dilakukan adalah tindakan mencoret-coret fasilitas ekowisata TNGGP seperti bangku, tempat sampah, *shelter,* dan beberapa pohon yang berada di pinggir hutan Pangrango. Dengan demikian kerusakan ini diatasi agar tidak berkembang ke dalam hutan (wawancara dilakukan dengan NP pada Jumat, 11 Januari 2013, pukul 14.00 WIB).

Dari perspektif pemerintah peneliti melihat bahwa upaya konservasi TNGGP mengalami persoalan yang muncul dari manajemen dana CI. Pemerintah sebagai aktor utama yang tidak ekslusif karena mengalami banyak kendala bergantung dan terus mengharapkan CI untuk lebih efektif lagi dalam menyelesaikan masalah internalnya agar mampu bekerja lebih efektif. Berkaitan dengan esensi yang dikemukakan Hurell dan Kingsbury, CI sebagai INGO lingkungan hidup selayaknya tidak memiliki persoalan dana serius karena ia sudah memiliki banyak cabang dan kemitraan di berbagai negara maupun

lokal yang siap menyalurkan dana. Peneliti juga melihat bahwa kendala dana juga dapat berpengaruh pada keadaan teknis yakni pemeliharaan fasilitas dan komitmen stafnya. Namun khusus TNGGP, dalam wawancara dengan informan berikut ini peneliti mengetahui akibat kendala dana langsung bagi kegiatan konservasi TNGGP

Hidaya Santosa (HS) sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) mengatakan bahwa CI masih mengalami kendala berkaitan dengan dana agar bisa tetap beroperasi dengan baik. Beliau memandang bahwa sebenarnya dari segi keterampilan CI sudah matang, namun pemerataan fokus program-program CI belum signifikan karena selama ini CI lebih berfokus di Bodogol. Terkadang Balai Besar juga mengalami kesulitan akibat jumlah data yang menumpuk dalam suatu periode. Data Balai Besar yang terkumpul harus dipilah dari data CI agar mampu dianalisa secara lebih akurat terutama yang berkaitan dengan jumlah masing-masing hewan dan tumbuhan TNGGP. Konservasi hutan berkaitan erat dengan ketelitian dalam mengelola seluruh data biota TNGGP.

Pihak Balai Besar sendiri pun juga memiliki kendala dalam melakukan kegiatan konservasinya. Beliau mengatakan bahwa selama dua tahun terakhir ini masih ada kasus penebangan pohon dalam mendapatkan kina sebanyak satu kasus serta pelakunya yang merupakan warga Jawa Barat sendiri melarikan diri ke Lampung. Dari sepuluh kasus perburuan hewan TNGGP terdapat satu kasus perburuan babi hutan dan dua kasus perburuan burung puyuh. Beliau melihat para pemburu ilegal ini menjual hewan tersebut dengan harga tinggi ke Kalimantan untuk dijadikan hewan peliharaan.

Hal lain yang cukup mengganggu adalah perilaku pengunjung yang tidak bertanggungjawab. Beliau menekankan bahwa pihak Balai Besar sudah membangun kamar mandi dengan jumlah cukup namun masih ada pengunjung yang membuang kotoran mereka di sembarang tempat, membuang sampah plastik dalam hutan dan memetik bunga secara sembarangan. Salah satu contoh kasus yang terjadi dalam dua tahun belakangan ini adalah seorang mahasiswa sebuah universitas yang melakukan pendakian memetik bunga *edelweiss* untuk dijadikan kenang-kenangan resepsi pernikahan. Tidak lama kemudian mahasiswa ini tertangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pihak Balai Besar dan kampusnya sendiri.

Selama ini pula Balai Besar berhak mengunggat berbagai tindakan pelanggaran tersebut terutama dengan pihak yang berwajib, namun masih ada perhitungan lain jika meminta kepolisian untuk mengatasi berbagai tindakan pelanggaran dalam TNGGP. Beliau mengatakan bahwa tidak setiap pelanggaran dapat diangkat menjadi kasus serius karena biaya yang dibayarkan oleh pihak Balai Besar kepada kepolisian untuk penanganan setiap kasus dapat mencapai 15 juta.

Beliaupun menganggap bahwa CI sebenarnya mampu meningkatkan fokusnya dan bersikap lebih tegas dalam menghadapi oknum yang tidak bertanggungjawab. Menurut beliau kendala dana juga menentukan fokus CI di TNGGP. Anton Aryo (AA) sebagai manajer konservasi lapangan tentunya terus menyesuaikan diri dengan keadaan CI dan tetap mengupayakan yang terbaik untuk terus melestarikan TNGGP bersama Balai Besar. Kendala lain yang agak mengkhawatirkan juga berasal dari perhatian pemerintah

daerah yang masih belum terfokus kepada TNGGP seutuhnya. Beliau meandang bahwa pemerintah daerah selama ini lebih sibuk memperhatikan kepentingan politik daerahnya daripada membesarkan perhatiannya terhadap masalah hutan. Hal ini pulalah yang juga memberikan kesempatan bagi para oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil keuntungan dari hutan TNGGP secara ilegal (wawancara dengan HS dilakukan pada Kamis, 7 Februari 2013, pukul 10.00 WIB).

Jika kita kembali pada esensi peran yang dikemukakan Mas'oed dan Arfani, Coser dan Rosenberg, serta Levinson, peneliti melihat bahwa titik permasalahan implementasi peran berada dalam pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam konteks lingkungan hidup, peneliti melihat bahwa norma-norma yang ditetapkan dalam penghargaan terhadap lingkungan masih belum dilakukan secara maksimal. Di sisi lain keadaan ini mencerminkan esensi yang dikemukakan oleh Ekins mengenai keseimbangan ekosistem yang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi masyarakat.

Peneliti melihat bahwa masyarakat di sekitar TNGGP idealnya turut serta berperan menjaga TNGGP dari kerusakan. Namun beberapa di antara mereka tidak memiliki standar hidup yang memadai atau tidak puas dengan keadaan ekonomi mereka sehingga mereka tega melakukan penebangan dan perburuan ilegal. Selain itu peneliti juga melihat perilaku pendaki yang kurang bertanggungjawab karena mereka tidak menyadari peran mereka dalam turut menjaga hutan.

Tuntutan norma terhadap mereka yang melakukan pelanggaran di kawasan konservasi selalu ditekankan oleh pihak Balai Besar dan CI. Pelanggaran di TNGGP dapat dilakukan oleh siapa saja yang tidak memahami peran ideal mereka terhadap

lingkungan. Secara objektif peneliti melihat bahwa CI dan Balai Besar sudah menjalankan peran mereka dengan baik, namun akan lebih baik jika CI mengatur dananya secara lebih efektif dan berbagi fokusnya konservasinya ke bagian TNGGP lainnya.

Peneliti melihat bahwa kendala yang dialami CI memiliki dampak negatif secara tidak langsung bagi kinerja Balai Besar. Dalam kemitraan tersebut peneliti melihat bahwa upaya konservasi tampak menyatu di antara CI dan Balai Besar sehingga alangkah lebih baik jika terjadi keseimbangan penuh dalam aspek manajemen dana yang dimiliki oleh kedua belah pihak, terutama CI. Dengan penerapan berbagai program yang selama ini berfokus di Bodogol tentu masih terdapat kemungkinan terjadinya pelanggaran di area TNGGP lainnya dan butuh waktu untuk menanggulangi pelanggaran yang terjadi di luar daerah Bodogol. Demikian pula dengan pengumpulan data di mana kedua belah pihak secara profesional dapat memelihara data masing-masing.

4.4. Upaya-Upaya yang Dilakukan *Conservation International* (CI) untuk Mengatasi Berbagai Persoalan Tersebut dalam Melestarikan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP)

Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa upaya mengatasi kendala di tingkat Asia Pasifik akan mempengaruhi upaya CI dan Balai Besar untuk mengatasi persoalan konservasi di TNGGP. Peneliti melihat bahwa terdapat kemungkinan bagi CI di Jawa Barat untuk keluar dari persoalan dananya. Ketika masa berlaku MoU telah berakhir, CI di Jawa Barat bisa saja menggunakan kesempatan tersebut untuk mengubah

bentuknya menjadi yayasan di mana ia tetap mendapat dukungan dana dari kantor pusatnya di Amerika Serikat ditambah dengan perizinan untuk melakukan penggalangan dana dalam negeri serta meningkatnya kekuasaan pemerintah atasnya.

Dengan demikian sesuai dengan esensi yang dikemukakan Jackson dan Sorensen mengenai hubungan internasional akan tercermin jika perubahan bentuk CI menjadi yayasan terjadi. CI yang telah menjadi yayasan akan terlibat dalam pola hubungan yang lebih intens dengan pemerintah Indonesia, yang kemudian akan membuat kebijakan bagi pola hubungan CI Jawa Barat pada tingkat regional yakni Asia Pasifik dan tingkat global yakni dengan kantor pusatnya di Amerika Serikat.

Anton Aryo (AA) sebagai Manajer Konservasi CI untuk Gunung Gede Pangrango dan Halimun Salak (Gedepahala) dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa berbagai upaya dalam memperbaiki kinerja CI secara umum berpengaruh pada semua program CI di Indonesia termasuk Gedepahala. Beliau mengatakan bahwa besar harapannya untuk terus memelihara kerjasama yang baik dengan berbagai pihak karena dengan demikian kesadaran manusia akan vitalnya hutan bagi kebutuhan manusia merupakan inti dari semua upaya yang dilakukan CI selama ini.

Persoalan penggalangan dana dan teknis dalam CI merupakan dua persoalan yang berkaitan satu sama lain karena selama ini staf CI terus memperjuangkan komitmen mereka dalam melakukan upaya reforestasi di TNGGP. Diperlukan kedisiplinan lebih dalam mengatur waktu, tenaga, keuangan dan emosi dalam menghadapi setiap persoalan yang muncul walaupun kawasan konservasi TNGGP tidak memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah konservasi CI lainnya di Indonesia.

Walaupun persoalan dana dan teknis merupakan induk masalah yang mempengaruhi kinerja program CI di beragam kawasan, namun penyelesaiannya juga tidak terlepas dari penyesuaian dengan kondisi masing-masing wilayah. Biasanya kantor pusat CI di AS akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi setiap program CI di berbagai negara termasuk wilayah Asia-Pasifik. Kemudian hasil rapat tersebut dipertimbangkan dan diimplementasi di divisi regional masing-masing, jadi para manajer konservasi langsung menerapkan yang menjadi bagiannya di masing-masing wilayaj konservasinya.

Beliau menambahkan bahwa meningkatnya modernisasi yang terjadi khususnya di wilayah Jawa Barat ini sebaiknya dipandang sebagai kemudahan dalam menjalankan program reforestasi TNGGP, dan di sisi lain kita tidak dapat membiarkan modernisasi memberikan dampak negatifnya seperti pengeksploitasi alam yang secara simultan mempromosikan *ignorance* pada lingkungan hidup meningkatkan dalam diri masyarakat Jawa Barat. Dalam menjalankan programnya, beliau pula terus mengingatkan masyarakat agar menggunakan SDA air secara lebih bijak karena Jawa Barat rentan akan pencemaran air tanah yang tidak bertanggungjawab (wawancara dengan AA dilakukan pada Kamis, 29 November 2012, pukul 15.00 WIB).

Di sini kita dapat melihat bahwa penyelesaian masalah internal CI tercermin dalam esensi yang dikemukakan *The Union of International Association* melalui Rudy. Walaupun program setiap cabang CI secara spesifik berbeda, penyelesaiannya selalu diutamakan di tingkat global kemudian regional berdasarkan pengumpulan data kinerja CI tingkat lokal kemudian regional. Hal ini yang memelihara tujuan CI secara

keseluruhan tetap bersifat internasional. Untuk menangani persoalan di lapangan sendiri CI selalu melakukan komunikasi dengan kantor pusat di Jakarta, Kemenhut RI dan Balai Besar TNGGP. Namun peneliti juga melihat bahwa sebaiknya CI menambah komunikasinya dengan masyarakat secara langsung dan merata.

Nining Ngudi Purnamaningtyas (NP) sebagai Kepala Sub Bagian Kerjasama Sekretaris Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Sekdirjen PHKA) Kementrian Kehutanan (Kemenhut) RI dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa pemerintah Indonesia dapat membantu CI dalam mendapatkan dana secara tidak langsung yakni dengan terus membuka peluang bagi investasi luar negeri agar mampu memberikan CI kesempatan untuk menggalang dana dari berbagai perusahaan yang berinvestasi tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah CI diharapkan agar memberikan kesempatan lebih bagi masyarakat lokal untuk menjadi tenaga kerja di INGO tersebut. CI juga memiliki tanggungjawab moral yakni melakukan pemberdayaan masyarakat lokal agar lebih mengenal lingkugannya sendiri. Dengan demikian CI sebaiknya membatasi ketergantungan pada tenaga kerja internasional CI untuk melakukan upaya konservasi hutan di Indonesia.

Beliau mengharapkan agar CI sebagai INGO lingkungan hidup bersikap lebih tegas dalam menjalankan program edukasi dan *awareness*nya sehingga jumlah sampah yang terdapat di Jawa Barat, khususnya di sekitar hutan Pangrango dapat berkurang serta CI dan pihak TNGGP sendiri mampu menjaga berbagai fasilitas ekowisata yang terdapat di hutan tersebut.

Sebagai tambahan beliau juga berharap bahwa CI mampu bekerjasama dengan masyarakat luas secara keseluruhan agar masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan tidak hanya memiliki pandangan sempit akan arti pohon dalam sebuah hutan, tetapi juga pohon-pohon yang selama ini berada di dalam kota agar tidak ditebang sembarangan, walaupun dengan alasan keselamatan dan keamanan. Dengan demikian beliau memandang bahwa keberadaan taman kota sama pentingnya dengan keberadan hutan dalam sebuah provinsi sebagai tempat tinggal hewan penjaga keseimbangan ekosistem, penyerap polusi, dan daerah penyerapan air (wawancara dengan NP dilakukan pada Jumat, 11 Januari 2013, pukul 14.00 WIB).

Dari pernyataan informan ini peneliti melihat bahwa sebagai saluran pemerintah Indonesia dalam melestarikan hutan, Kemenhut RI juga dapat mengingatkan kita bahwa selama ini keberadaan TNGGP tidak bisa dinganggu gugat dan tidak selamanya dapat berjalan sendiri. Kita sebagai masyarakat tidak bisa hanya menitikberatkan persoalan lingkungan hidup di TNGGP saja, namun juga kita sebaiknya melakukan tindakan lingkungan dari hal-hal sepele. Kawasan perkotaan pun juga sebaiknya mendapatkan perhatian bersama dari pemerintah beserta penduduk. Peneliti melihat juga bahwa keberadaan taman-taman kota merupakan vital bagi keseimbangan ekosistem Jawa Barat secara keseluruhan.

Jika dikaitkan dengan esensi yang dikemukakan oleh *World Resource Institute* melalui Ekins tentang penyebab kerusakan lingkungan, peneliti melihat bahwa masyarakat juga sebaiknya diingatkan untuk tidak menggunakan berbagai produk dengan bahan kimia yang mampu merusak ekosistem alam. Peneliti melihat bahwa upaya

konservasi dalam makna luas akan sia-sia jika masyarakat Jawa Barat tidak peduli dengan alamnya. Demikian pula dengan hasil wawancara peneliti dengan informan terakhir yang secara garis besar menyatakan bahwa persoalan upaya konservasi TNGGP secara luas Balai Besar dan CI perlu melibatkan banyak pihak.

Hidaya Santosa (HS) sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) mengatakan bahwa selama ini Balai Besar dan CI terus melakukan penanggulangan kendala pelestarian TNGGP. Beliau menganggap sebenarnya yang menjadi sumber kendala utama adalah perilaku masyarakat yang selama ini kurang bertanggungjawab. Seringkali beliau bersama pegawai CI melakukan kunjungan ke rumah penduduk yang diketahui melakukan pelanggaran di wilayah konservasi TNGGP. Penanggulangan kendala sebaiknya dilakukan dari pencegahan masyarakat untuk mengambil benda apapun yang berada di seluruh wilayah konservasi TNGGP sampai bekerjasama dengan pihak yang berwajib.

Masyarakat yang melakukan pelanggaran yakni menebang pohon, perburuan ilegal dan pencurian lahan kawasan konservasi TNGGP sebanyak sekali akan dikunjungi dan diberi peringatan oleh pegawai Balai Besar. Kunjungan kadang didampingi oleh staf CI. Pelanggaran yang dilakukan sebanyak dua kali akan ditindaklanjuti bersama RT/RW. Jika mencapai tiga kali maka pelanggar tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Kendala lain seperti perilaku pengunjung yang kurang bertanggungjawab ditanggulangi dengan penugasan pemandu yang ramah namun tegas dalam membantu dan memantau pendaki agar bertindak sesuai etika walaupun sedang berada di alam

bebas. Para pendaki juga selalu diberi peringatan agar tetap tidak mengotori berbagai mata air dan mengambil buah pohon di dalam TNGGP. Pendaki sebaiknya juga membawa barang-barang ramah lingkungan yakni bebas dari bahan kimia dan membuang sampah yang berbahaya bagi ekosistem kawasan konservasi TNGGP.

Demikian pula dengan pelestarian hewan TNGGP. Pegawai Balai Besar mempelajari keterampilan menangkar owa Jawa di Bodogol dan memasang kamera tersembunyi di berbagai tempat yang sering dilewati macan tutul. Owa Jawa yang merupakan mamalia monogami sering diperjualbelikan oleh para pemburu ilegal untuk dijadikan hewan peliharaan, namun beliau merasa lega karena sejak CI ikut serta dalam kegiatan konservasi TNGGP, pihak Balai Besar dapat dengan mudah mendapatkan data akurat mengenai keadaan TNGGP setiap saat.

Beliau mengharapkan CI untuk tidak hanya berfokus pada kegiatan di Bodogol namun juga memperluas interaksinya dengan masyarakat di seluruh pinggiran kawasan TNGGP secara langsung agar program edukasi dan *awareness*nya lebih efektif. Demikian juga dengan pengumpulan serta distribusi data oleh CI kepada Balai Besar agar dapat dilakukan secara lebih matang dan akurat. Beliau menganggap sebelum CI hadir di TNGGP Balai Besar memiliki beban berlebih dalam mengelola data sambil memenuhi berbagai prioritas kegiatan konservasi lainnya. Kehadiran CI merupakan jawaban yang tepat akan persoalan lama ini, yakni Balai Besar akhirnya mempunyai mitra yang dapat dipercaya untuk berbagai tugas dalam konservasi TNGGP (wawancara dengan HS dilakukan pada Kamis, 7 Februari 2013, pukul 10.00 WIB).

Sebenarnya peneliti melihat bahwa penanggulangan berbagai kendala yang efektif untuk mengatasi beban dana CI adalah INGO ini dapat mengambil keputusan untuk mengubah bentuk menjadi yayasan khusus untuk program TNGGP. Peneliti melihat peluang yang lebih besar bagi aliran dana jika CI benar-benar berubah menjadi yayasan dan program-programnya juga dapat diperluas ke berbagai area TNGGP selain Bodogol. Dengan demikian seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar TNGGP lebih merasakan manfaat upaya konservasi yang dilakukan CI dan pihak Balai Besar secara lebih merata, dan tentu saja keinginan nekad bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran akan semakin kecil. CI sendiri sebenarnya juga merasakan demikian, namun keputusan tetap saja disesuaikan dengan keadaan yang dialaminya.

Jika kita kembali lagi pada konsep peran yang dikemukakan oleh Mas'oed dan Arfani, Cosser dan Rossenberg, serta Levinson, kita dapat melihat bahwa peran yang dihubungkan dari berbagai pihak yang bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung dalam pelestarian TNGGP merupakan wujud kemitraan yang dilakukan CI selama ini. Penetapan TNGGP itu sendiri sebenarnya tercerminkan dalam esensi yang dikemukakan oleh Erwin mengenai berbagai kongres internasional.